**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak
Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan
(Studi Di Kepolisian Resor Banyumas)**
**LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILD VICTIM OF CRIMINAL ACT
OF PERSECUTION DURING INVESTIGATION PROCESS (STUDY AT
BANYUMAS POLICE DEPARTMENT)**

Rizki Iqbal Maulana, Setya Wahyudi, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
riskiiqbalm@gmail.com

Abstrak

Para korban anak ini sering kali dibuat tidak berdaya, ketika dirinya mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Dalam proses acara persidangan para korban ini pun sedikit kurang diperhatikan. Bahwa dalam prakteknya para orang awam hanya melihat pendampingan bantuan hukum kepada para terdakwa atau tersangka, sedangkan para korban tidak diperhatikan dalam urusan bantuan hukum ini. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Banyumas). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui kepustakaan dan melalui wawancara yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses penyidikan dapat dilakukan dengan cara diversifikasi ketika dua belah pihak merupakan anak dan tidak dapat dilakukan diversifikasi ketika korban adalah anak dan pelaku merupakan orang dewasa. Dalam pelaksanaan diversifikasi setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban anak atau melibatkan anak dalam kasus hukum tersebut , maka atas keinginan dari pihak korban proses selanjutnya akan dilakukan diversifikasi dikarenakan anak perlu untuk tetap dalam rasa kekeluargaan agar tetap merasa nyaman dan aman.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Korban Anak

Abstract

These child-victims are often made helpless when they experience violence both verbally and physically. In the trial process these victims were also given minor attention. Practically, citizen only see legal aid as an assist toward defendants or suspects, while the victims are not considered in the matter of legal aid. Based

on these descriptions, author is interested in researching and writing the results in the thesis entitle: Legal Protection towards Child Victim of Criminal Act of Persecution during Investigation Process (Study at Banyumas Police Department). The research method used in this study is empirical juridical, with research specifications of descriptive research. The data used in this study is secondary data as well as primary data obtained through literature and through interviews which are then systematically described. The form of legal protection for child victims in the investigation process can be done by diversion when both parties are children and cannot be diversified when the victim is a child and the perpetrator is an adult. Diversion is implemented after occur a complaint from the public that a criminal act of persecution caused a child victim or involving a child in the legal case, then at the wishes of the victim the next process will be diversified because the child needs to remain in a sense of kinship in order to remain comfortable and safe.

Keywords : *Legal Protection, Investigation, Child-Victim*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Para korban anak ini sering kali dibuat tidak berdaya, ketika dirinya mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Dalam proses acara persidangan para korban ini pun sedikit kurang diperhatikan. Bahwa dalam prakteknya para orang awam hanya melihat pendampingan bantuan hukum kepada para terdakwa atau tersangka, sedangkan para korban tidak diperhatikan dalam urusan bantuan hukum ini. Fenomena ketidakadilan yang dialami korban akan lebih jelas dan nyata apabila di kaji dari tujuan pidana dan pembedanaannya dalam hukum pidana positif, karena pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, permasyarakatan dan lain-lain.

Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian saja, tidak jarang hak-hak asasi korban terabaikan, bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga maupun pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offenders oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana (**Wibowo, 2013**).

Kadang kala korban merasa bahwa dirinya adalah masyarakat yang buta akan hukum, dan tidak tahu harus melakukan apa ketika dalam proses persidangan. Dan juga adanya ketakutan untuk para korban ini menghadapi hukum itu, sehingga disini ada hak-hak korban yang harus dipenuhi. Menurut Arif Gosita (**Wibowo, 2013**) hak korban antara lain:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut,

- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya),
 - c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya apabila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
 - d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
 - e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya,
 - f. Korban berhak menolak menjadi saksi apabila hal itu akan membahayakan dirinya,
 - g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi,
 - h. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum,
 - i. Korban berhak menggunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
 3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat atau kedaluwarsa.
 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Secara yuridis normatif, perlindungan ternyata lebih diartikan pada aspek fisik materiil, sementara itu, penderitaan yang dialami oleh korban tidak selalu dalam wilayah bentuk fisik, melainkan juga psikis bahkan juga seringkali korban mengalami trauma yang berkepanjangan akibat terjadinya kerusuhan tersebut. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut.

Proses penyidikan dalam proses acara persidangan peradilan pidana dilakukan terhadap korban maupun tersangka itu sendiri guna untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta baru yang ada di tubuh pelaku, saksi, korban atau tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Namun di samping itu proses penyidikan yang dilakukan kepada korban harus dilakukan dengan melihat hak-hak korban, khususnya kepada korban anak kejahatan suatu tindak pidana, dimana para korban anak kejahatan suatu tindak pidana ini harus diberikan sebuah perlindungan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Tujuannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak ini jelas terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa :

“bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan

korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana”

Selain itu, korban secara teoritis mempunyai dasar untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan (**Wibowo, 2013**).

Berdasarkan pada kasus yang disinggung pada latar belakang diatas bahwa kasus penganiayaan terhadap anak yang disinggung pada latar belakang diatas berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyumas dan di tangani oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Banyumas dan juga dikarenakan korban, sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan merupakan anak yang butuh untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian, yang dituangkan dalam judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Banyumas)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban anak kejahatan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Banyumas?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resor Banyumas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak kejahatan tindak pidana penganiayaan ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan	: Yuridis Empiris
2. Spesifikasi Penelitian	: Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian	: Kepolisian Resort Banyumas
4. Sumber Data	: Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data	: Studi Kepustakaan dan Wawancara
6. Metode Penyajian Data	: Uraian Teks Secara Sistematis
7. Metode Analisis Data	: Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Penyidikan

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya dan hak-haknya, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini saat anak berkonflik dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemanantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempetahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa guna menghindarkan anak dari labelisasi. Sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Sistem Peradilan Anak berbeda dengan Sistem Peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum (Gultom, 2014).

Anak pada perkembangannya memiliki fase yang menjadikan anak mengalami perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, mombolos sekolah atau kabur dari rumah;

- 2) *Junvile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Djamil, 2015).

Menurut **Setya Wahyudi**, Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi anak, dapat dikemukakan sebagai berikut (**Wahyudi, 2011**) :

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- 7) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- 8) Pengendalian anak/remaja;

2. Hambatan yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Resor Banyumas dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan terdapat sebuah perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap pihak-pihak yang berperkara baik dari pihak tersangka maupun pihak korban dan saksi, namun dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ditemui oleh para penyidik untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi pihak korban anak yang berperkara dalam upaya untuk menegakan hukum.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan sebuah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (**Raharjo, 1983**).

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

- 1) Faktor hukum;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Budaya

Berdasarkan kutipan dari Soerjono Soekanto tersebut dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Banyumas Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., didapatkan sebuah pembahasan, yaitu:

1) Faktor Hukum

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Banyumas Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., beliau mengatakan bahwa :

"Dalam hal hukum yang berlaku bahwa Undang-Undang yang sudah mengatur tentang pemberian perlindungan hukum sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana didalam aturan tersebut aturan yang mengatur belum kuat dalam hal kelembagaan LPSK sendiri sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban."

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak lepas dari peran seorang penegak hukum yang handal, dalam hal penyidikan dalam kasus yang melibatkan korban anak ,penegak hukum yang berwenang menyidik adalah penyidik dari Unit PPA Kepolisian Resor Banyumas, dalam prakteknya para penyidik sebagai penegak hukum juga dapat melakukan kesalahan maupun human error dikarenakan kurangnya kordinasi antar lini ,namun faktor tersebut sangat minim terjadi, menurut hasil wawancara dengan Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., mengatakan:

"Para penyidik sebagai penegak hukum juga serta merta dapat menemui hambatan dikarenakan faktor intern, yaitu dikarenakan keterbatasan dari SDM itu sendiri, yang mengakibatkan proses perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan dapat menemui sebuah hambatan, namun biasanya kesalahan atau hambatan yang terjadi dari faktor internal tersebut sangat minim, jajaran Unit PPA Kepolisian Resor Banyumas dapat mengantisipasi karena kerjasama antar anggota yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Namun hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan."

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Hal-hal penunjang dalam penegakan hukum dalam hal perlindungan hukum ini dapat menemukan sebuah hambatan yang sangat mengganggu dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada korban. Menurut Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., sebagai berikut:

"Sepertinya halnya yang sudah sampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan sarana dan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam hal perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban ataupun saksi, dalam hal ini jika dalam aturan lembaga tersebut tidak memiliki kejelasan aturan maka fasilitas yang diberikan pun akan menjadi sebuah hambatan. Lalu, dalam hal memberikan pendampingan terhadap korban yang harus didampingi psikiater, biasanya hambatan itu hadir ketika susah nya mencari psikiater di wilayah hukum banyumas, dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak ataupun pihak korban tidak setuju dengan pendampingan dari psikiater tersebut dikarenakan pandangan jika sudah di datangkan psikiater biasanya pihak korban merasa bahwa

korban ini ada gangguan jiwa padahal pihak keluarga tidak merasakan hal tersebut.”

Fasilitas yang disediakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dalam prakteknya dapat menemui sebuah hambatan ketika sarana ini ditolak oleh pihak korban atau kurangnya ketersediaan dari pihak yang akan dihadirkan sebagai sarana perlindungan hukum yang merupakan sebuah hak bagi korban apalagi melihat pihak korban merupakan anak dibawah umur, maka sarana tersebut haruslah wajib diberikan kepada korban tersebut.

4) Faktor Masyarakat

Upaya penegakan hukum adalah diberikan kepada masyarakat yang berperkara, dalam hal pemberian perlindungan hukum, itu merupakan sebuah hak yang harus diterima oleh masyarakat yang berperkara, terkhusus adalah anak-anak yang mengalami permasalahan hukum. Maka dalam pemberian perlindungan hukum faktor masyarakat dapat menjadi sebuah hambatan dikarenakan kurangnya pengetahuan akan aturan-aturan yang mengatur, menurut hasil wawancara dengan Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., adalah sebagai berikut:

”Dalam pemberian perlindungan hukum, masyarakat disini adalah pihak yang mendapatkan hak untuk diberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan, namun masyarakat biasanya kurang memahami tentang aturanaturan yang berlaku dan tidak tahu tentang apa saja hak-hak yang akan mereka dapatkan ketika menjadi korban terutama bagi anak, biasanya anak akan merasa takut jika dihadapkan dengan polisi sebagai penyidik yang membuat proses pemeriksaan dalam penyidikan akan menemui kesulitan. Maka dari itu, dalam penyidikan yang menangani kasus yang melibatkan kasus anak, biasanya anggota penyidik dari Unit PPA Kepolisian Resor Banyumas yang menangani korban anak adalah Polisi Wanita, dikarenakan kepentingan dari pihak korban, mengenai piskir korban merasa aman dan nyaman.”

Masyarakat dalam proses penyidikan terkadang kurang memahami aturan-aturan dan hak-hak apa saja yang akan mereka dapat ketika menjadi korban sehingga hal ini akan sedikit menghambat pemberian perlindungan hukum karena masyarakat kurang memahami langkah-langkah yang harus ditempuh.

5) Faktor Budaya

Kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat saat ini mempengaruhi akan kesadaran akan hukum yang timbul dalam masyarakat, bagaimana hukum itu sendiri hidup didalam masyarakat. Dalam keefektivitasan hukum itu sendiri budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pemberian perlindungan hukum dalam proses penyidikan, dimana penyidik akan lebih mudah memperoleh informasi ketika pemahaman akan hukum pada masyarakat sudah berjalan dengan baik atau masyarakat secara keseluruhan sudah faham akan hukum yang berlaku. Dalam wawancara dengan Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., menuturkan bahwa :

“masyarakat berperan aktif dalam proses perlindungan hukum ketika menghadapi suatu kasus, maka hal itu akan mempermudah penyidik dalam menyidik suatu kasus, dalam menentukan pihak-pihak yang berperkara juga akan lebih mudah karena itu tadi masyarakat sudah melek akan hukum. Namun, jika disini masyarakat belum sadar akan hukum itu yang menjadi suatu hal yang akan memperpanjang masa penyidikan karena budaya masyarakat disini belum begitu faham akan hukum yang berlaku, misalkan masyarakat belum begitu faham akan adanya diversi karena kasusnya menyangkut tentang anak.”

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut (**Supatmi, 2003**).

Dengan demikian hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Banyumas berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara dengan Iptu. Iwan Kurniadi, S.H., bahwa dalam proses pemberian perlindungan hukum dalam proses penyidikan itu dapat dilakukan cara diversi namun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh penyidik dari Kepolisian Resor Banyumas yaitu :

- a) Faktor Hukum : Kurangnya hukum yang kuat dalam mengatur lembaga yang memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap korban anak pada suatu kasus tertentu.
- b) Faktor Penegak Hukum : bahwa dalam jumlah personel dalam satuan unit PPA Kepolisian Resor Banyumas yang terbatas , dapat menjadi penghambat dalam suatu proses pemberian perlindungan hukum.
- c) Faktor Masyarakat : masyarakat yang sedang dalam proses hukum terlebih seorang anak yang kurang faham dengan hukum yang berlaku dan tidak mengetahui langkah-langkah dalam suatu proses penyidikan dapat menghambat penyidik dalam memberikan perlindungan hukum.
- d) Faktor budaya : Kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat saat ini mempengaruhi akan kesadaran akan hukum yang timbul dalam masyarakat, bagaimana hukum itu sendiri hidup didalam masyarakat. Dalam keefektivitasan hukum itu sendiri budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pemberian perlindungan hukum dalam proses penyidikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan
Bahwa bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses penyidikan dapat dilakukan cara diversif jika kedua belah pihak merupakan anak dan tidak dapat dilakukan diversif, jika pihak korban adalah anak dan pihak pelaku merupakan orang dewasa. Sistem peradilan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 29A ketika sudah mendapatkan izin dari orang tua atau wali , lalu kasus tersebut dapat dilimpahkan ke kejaksaan melalui prosedur sistem peradilan umum. Jika korban dan pelaku merupakan anak maka dapat diupayakan diversif yaitu, setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban anak dalam kasus hukum tersebut , maka atas keinginan dari pihak korban proses selanjutnya akan dilakukan diversif dikarenakan anak perlu untuk tetap dalam rasa kekeluargaan agar tetap merasa nyaman dan aman.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Banyumas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak kejahatan tindak pidana penganiayaan
 - 1) Faktor Hukum : Kurangnya hukum yang kuat dalam mengatur lembaga yang memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap korban anak pada suatu kasus tertentu.
 - 2) Faktor Penegak Hukum : bahwa dalam jumlah personel dalam satuan unit PPA Kepolisian Resor Banyumas yang terbatas , dapat menjadi penghambat dalam suatu proses pemberian perlindungan hukum.
 - 3) Faktor Masyarakat : masyarakat yang sedang dalam proses hukum terlebih seorang anak yang kurang faham dengan hukum yang berlaku dan tidak mengetahui langkah-langkah dalam suatu proses penyidikan dapat menghambat penyidik dalam memberikan perlindungan hukum.
 - 4) Faktor budaya : Kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat saat ini mempengaruhi akan kesadaran akan hukum yang timbul dalam masyarakat, bagaimana hukum itu sendiri hidup didalam masyarakat. Dalam keefektifitasan hukum itu sendiri budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pemberian perlindungan hukum dalam proses penyidikan.

2. Saran

- a. Sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilalui dengan upaya Diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan diversi.
- b. Aparat Kepolisian Polres Banyumas khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam hal jumlah keanggotaan harus ditambahkan disesuaikan dengan prosedur yang ada agar tidak menghambat pada proses penyidikan.
- c. Kepada Keluarga Korban dan Masyarakat diharapkan membantu, mendukung anak yang berhadapan dengan hukum dengan dilakukannya proses perlindungan hukum yang sudah diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan proses kekeluargaan demi kepentingan hak-hak anak untuk di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Djamil, N. N . (2015). Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, M. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purnianti, Ninik widya et.al. (2003). Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta : UNICEF Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. (1983). Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wibowo, A. (2013). Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa : Suatu Tinjauan Viktimologi. Yogyakarta:Thafa Media.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia ,Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

_____,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

_____,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

_____,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

_____,Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

_____,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban